

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar bagi Negara manapun dan menjadi pusat perhatian dunia. Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan (Atmajha, 2015)

Masyarakat bisa dikatakan miskin jika pendapatan di bawah USD \$1 perhari. Tidak hanya itu, namun di Indonesia juga memiliki Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu: 1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan, 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), 4) kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan 5) kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya. Kemiskinan juga bisa dilihat dari kelayakan rumah yang di huni, karena Rumah adalah suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Memiliki sebuah rumah yang layak huni merupakan kebutuhan setiap keluarga. Dalam beberapa waktu ini kebutuhan akan rumah layak huni

semakin meningkat, namun tidak seiring dengan meningkatnya dengan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah yang mengharuskan mereka hidup di rumah yang tidak layak huni (Ghafaralie, 2015).

Tabel 1.1
Angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara tahun 2012-2016

<i>Tahun</i>	<i>Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)</i>	<i>Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)</i>	<i>Presentase penduduk miskin (persen)</i>
2012	205.369	164	18.87
2013	221.056	166.8	18.71
2014	229.718	159.5	17.77
2015	236.399	165.4	18.37
2016	252.328	158.2	17.46

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Dari data diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara mengalami naik turun, namun pada tahun 2016 kemiskinan yang terjadi merupakan yang terendah dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir bersumber Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dengan 17.46 persen (BPS, 2017)

Pada dasarnya membangun dan memiliki rumah adalah kewajiban bagi setiap individu atau masyarakat yang tinggal di suatu negara. Negara disini berperan sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan ini, Faktanya ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik hunian dalam lingkungan sosial ekonominya. Sebagian Pemerintah Daerah telah menangani sektor perumahan dan

pemukiman sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Umumnya kegiatan diarahkan pada stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni (Ghafaralie, 2015).

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghambat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan pendapatan yang tidak menentu, keterbatasan keterampilan dalam mencari lapangan kerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, menjadi faktor yang membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan ini. Pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa rumah menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan pemerintah demi memenuhi suatu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak untuk ditinggali (Prabawati, 2013).

Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk

meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Salah satu program adalah program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH). Rumah mempunyai fungsi yang sangat vital dan menjadi kebutuhan dasar yang mempengaruhi tingkat produktifitas masyarakat (Atmajha, 2015)

Tabel 1.2
Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni (Rumah)
2012	60.292
2013	58.220
2014	56.478
2015	54.596
2016	52.981

Sumber: BPS kabupaten Banjarnegara tahun 2016

Salah satu penyebab angka kemiskinan yang tinggi yaitu dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH), berdasarkan data padu BPS dari tahun 2011-2015 telah mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan pada tahun 2015 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan rumah yang paling sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerinah Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskin yang terjadi dengan meluncurkan sebuah program yang integritas dan terpadu.

Program pengentasan kemiskinan ini dilakukan karena angka kemiskinan di kabupaten Banjarnegara relatif tinggi, sehingga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut. Salah satunya dengan program rehab rumah tidak layak huni, program ini dilakukan mengingat bahwa rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga dalam aspek fisik, mental dan sosial. Fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik harus dipenuhi syarat-syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun, hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan

perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) baik pemerintah pusat maupun daerah. Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena dalam pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun tidak langsung (Atmajha, 2015)

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur evaluasi kebijakan dapat diukur menjadi 6 yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2003:610)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak layak Huni di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016?
2. Apa indikator keberhasilan program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program rumah tidak layak huni di Kabupaten banjarnegara Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Evaluasi terhadap program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016
2. Untuk mengetahui indikator keberhasilan Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara 2016.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan akan memperkaya kajian bagi studi Ilmu pemerintahan khususnya tentang Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu juga sangat

diharapkan untuk memperkaya literature yang mengkaji masalah Evaluasi Program yang berhubungan dengan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni.

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan dorongan bagi perkembangan teori tentang Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan bagi peneliti

Manfaat pribadi bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan akademis untuk meraih gelar sarjana pada program studi *ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan politik*. Dan hasil dari penelitian tentang Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan serta sebagai salah satu rujukan untuk meneliti lebih lanjut dari sisi dan masalah penelitian yang sama dalam konteks yang berbeda kedepannya.

b. Masyarakat luas

Menambah pengetahuan tentang kondisi di lapangan tentang Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten Banjarnegara. Selain itu digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya yang serupa. Juga diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk

perbaikan Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni tahun anggaran selanjutnya.

c. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai fasilitator, Regulator dan Penanggungjawab mengenai Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk menyempurnakan pelaksanaan Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar semakin baik.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.3
 Penelitian terdahulu tentang Rumah Tidak Layak Huni

Nama penulis	Judul	Temuan
Putri Prissilia Pramitha (2016)	Evaluasi kinerja program Pemugaran rumah tidak layak huni di kabupaten purbalingga	evaluasi kinerja program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori program yang baik, meskipun belum merata dan belum dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan kemiskinan, karena program ini hanya memiliki dampak pada aspek pengentasan kemiskinan yaitu dalam hal papan.
Tri Wahyuningrum dan Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. (2015)	Evaluasi program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di desa kedungharjo kecamatan balerejo kabupaten	program Pemugaran RTLH di Desa Kedungrejo masih terdapat kendala, maka saran peneliti adalah 1) pihak desa Kedungrejo melakukan survey terkait kondisi rumah calon kelompok sasaran dan memprioritaskan bagian rumah yang akan direnovasi selain ALADIN, sehingga dana bantuan

	madiun	dapat dipergunakan sesuai kebutuhan, 2) kelompok sasaran membuat surat pernyataan bahwa rumah yang akan diPemugaran tidak dalam status konflik, 3) diperlukan pengawasan mulai dari proses sosialisasi agar tidak terjadi misskomunikasi antara pihak penyelenggara dengan kelompok sasaran.
RULI KHUSNU RIZKA (2010)	Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di kota surakarta	Efisiensi pelaksanaan program, belum sepenuhnya efisien karena masih ada kekurangan yang terjadi dalam kepanitiaan tingkat kota. Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari keberhasilan program berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial masih belum begitu tinggi. Tingkat responsivitas masyarakat atas program perbaikan rumah tidak layak huni juga masih cukup rendah.
Nadia Dewinta, dan H. Muhammad Ridwan (2012)	Pelaksanaan program Pemugaran sosial rumah tidak layak huni (Rs RTLH) bagi keluarga miskin di kecamatan bintang timur kabupaten bintang tahun 2011	pelaksanaan program telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung meskipun dalam pelaksanaannya sendiri masih ada kekurangan, kelemahan dan hambatan yang terjadi. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang, terjdinya keterlambatan dalam pelaksanaan program RS-RTLH yang antara lain disebabkan oleh waktu yang diberikan, keterlambatan datangnya bahan bangunan serta oleh faktor cuaca yang tidak mendukung.
MAULLANA CHANDRA ATMAJHA (2015)	Evaluasi pelaksanaan program Pemugaran rumah tidak layak huni sebagai upaya pengentasan kemiskinan dikota	secara umum penelitian ini dilihat dari dimensi masukan (input) yang indikatornya terdiri dari ketersediaan pegawai, kesesuaian data penerima, pedoman teknis dan biaya pada evaluasi program rumah tidak layak huni (RTLH), kecenderungan responden berpendapat masih belum optimal, untuk dimensi aktivitas atau

	tanjungpinang	proses dengan indikator yang digunakan yaitu waktu masih kurang dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya, tetapi untuk pengawasan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan dimensi hasil (output) dengan indikator kualitas program, kelayakan program, dan ketepatan program sudah baik.
Sarimah (2016)	Pelaksanaan pembangunan dalam program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) kelurahan karas kecamatan galangkota batam tahun 2014	pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) diKelurahan Karas Tahun 2014 sudah diupayakan secara optimal oleh penerima bantuan namun dari proses pelaksanaan pembangunan rumah dengan adanya masalah yang timbul, instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan rumah lebih banyak memberikan masukan dan saran tanpa adanya tindakan yang nyata, dalam hal ini bisa dikatakan kurang keseriusan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi demi keberhasilan kegiatan ini.

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian di atas bahwa penelitian yang sudah dilakukan atau dilaksanakan mengenai Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni hanya terfokus pada pelaksanaan dan evaluasinya namun tidak dicantumkan sumber dana yang diperoleh untuk Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan studi terdahulu yang maka penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016. Pada penelitian ini penulis berfokus mulai dari perencanaan, pelaksaan, sumber dan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Banjarnegara selaku pemegang otoritas perumus dan pelaksana kebijakan program Pemugaran rumah tidak layak huni di kabupaten Banjarnegara.

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi program

a. pengertian evaluasi

1. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan obyektif pada proyek yang sedang berlangsung atau selesai, program atau kebijakan, desain, implementasi dan hasil. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, pengembangan efisiensi, efektifitas, dampak dan berkelanjutan. Evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna, memungkinkan penggabungan dalam proses pengambilan keputusan. (Sangweni, 2008).

Darwin (dalam Wahyu, 2008) menyebutkan evaluasi pada dasarnya adalah sebuah alat untuk menilai seberapa jauh sebuah program berjalan dapat membuahkan hasil yang didapat dengan tujuan yang ditentukan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap suatu masalah yang pada umumnya dapat menunjukkan baik serta buruknya suatu masalah tersebut. Dengan kaitanya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuannya Hanafi (dalam Wahyu, 2008).

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk dapat mengetahui 4 hal yaitu: Proses pembuatan kebijakan, Proses implementasi kebijakan, Konsekuensi kebijakan, Efektivitas dampak kebijakan Wibowo (dalam Wahyu, 2008).

Evaluasi merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang berjalanya suatu kebijakan, kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam mengambil keputusan. peran utama evaluasi dalam hal ini adalah untuk menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi para pembuat keputusan untuk membuat kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya Cepi (dalam Muktiali, 2009).

Sementara itu Pall (dalam Wahyu 2008) memisahkan evaluasi kedalam empat kategori, yaitu: perencanaan dan membutuhkan evaluasi, proses evaluasi, dampak dari evaluasi, efisiensi evaluasi.

Menurut Riyanto (dalam Wahyu 2008) evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan evaluasi yang dirumuskan seperti berikut : Diperuntukan untuk mengevaluasi terhadap proses pembuatan kebijakan, dilakukan dengan menambahkan pemahaman apa yang telah terjadi selain prinsip kepatuhan, dilaksanakan untuk dapat mengevaluasi dampak untuk waktu jangka pendek.

Evaluasi merupakan sebuah proses yang harus dilaksanakan seseorang atau sekelompok untuk memperoleh informasi berguna

untuk menentukan satu atau dua pilihan-pilihan yang dapat digunakan, karena menentukan atau memutuskan suatu kebijakan tidak bisa secara sembarang, maka pilihan-pilihan itu harus diberikan nilai yang relatif, oleh karena itu pemberian nilai-nilai tersebut memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi dari evaluasi untuk mengambil keputusan (Uzer, 2003).

sebuah aktifitas pembuatan keputusan untuk menilai sesuatu, baik itu objek, kegiatan, peristiwa yang sedang berjalan maupun tidak. Patton (dalam Carlos 2006) menyatakan sebuah proses evaluasi harus menekankan pada hasil atau keluaran yang didapat dibanding melihat hasil tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipastikan bahwa didalam suatu implementasi program yang telah dievaluasi menitik beratkan pada hasil dari program tersebut.

Basaid mendefinisikan “Evaluasi suatu upaya yang sistematis dalam rangka mengumpulkan informasi dan atau permasalahan yang dialami dalam tahap pelaksanaan serta mencatat pula berbagai keberhasilan yang dicapai guna dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan pada proses perencanaan proyek masa datang agar dapat lebih efisien dan efektif”. (Atmajha, 2015)

2 Program

Secara pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan, sering pula di artikan bahwa program adalah kerangka dasar dari

pelaksanaan suatu kegiatan. Pengertian pengertian juga bisa disebut sebagai rancangan mengenai asas, serta usaha memahami mengenai pengertian program. (Zainudin,2014:4)

Menurut siagian (2006:127) program dapat diartikan menjadi dua istilah, yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah buah bentuk rencana yang akan dilaksanakan. Apabila program dikaitkan dengan evaluasi program, maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadinya dalam dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu:

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu yang relative lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

b. Sifat Evaluasi

Ada beberapa karakteristik evaluasi yang membedakan dari metode kebijakan analisis yang lainnya: (Dunn, 2003:609)

1. Fokus nilai: evaluasi beda dengan pemantaun karena evaluasi lebih focus kepada nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi menentukan manfaat atau kegunaan suatu program, bukan sekedar suatu penampilan informasi mengenai hasil aksi kebijakan.
2. Interdependensi fakta nilai: tuntutan evaluasi tergantung bak “fakta” maupun “nilai. Dalam evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan tersebut berharga bagi sejumlah individu, sekelompok hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau: evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-asi dilakukan (*ex ante*).
4. Dualitas nilai: nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan sekaligus cara.

c. Tujuan Evaluasi

setiap kegiatan yang dilakukan atau dijalankan pasti mempunyai tujuan dan manfaat, begitu juga dengan evaluasi sangat diperlukan agar suatu kebijakan atau program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. (Arikunto, 2002:13)

pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan atau membuat kebijakan tertentu yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

d. Kriteria Evaluasi

Menurut William N Dunn ada beberapa kriteria evaluasi suatu kebijakan yakni (Dunn, 2003:610)

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang sesuai dengan target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh tata kelola, dan apakah hasil yang diinginkan tersebut telah dicapai. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu efek yang dikehendaki dalam pekerjaan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas

juga disebut efektif, capaian tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah ketepatan dalam pemanfaatan sumber daya ada dan ketepatan dalam penggunaan biaya dengan memanfaatkan yang menghasilkan. Efisiensi harus selalu kualitatif dan dapat diukur (terukur), efisien adalah hasil usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan. Efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara inputnya dengan outputnya. Efisiensi dalam menggunakan input (input) akan menghasilkan produktifitas tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi manapun dalam bidang kegiatannya.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah kriteria untuk menilai apakah pencapaian hasil yang ditemukan sesuai dengan yang diinginkan. Kecukupan juga dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Pemerataan

Perataan adalah kriteria berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk mengukur ketepatan penggunaan biaya dan manfaat apakah yang didistribusikan secara merata. untuk kelompok sasaran.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah kriteria untuk mengukur hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

2. Perumahan dan permukiman

a. Perumahan

Foldi (Dalam Marianata, 2014)Perumahan dan permukiman merupakan pengetahuan yang multidimensional. Karena lingkup yang multidimensi inilah maka pemaknaan dan sudut pandang

terhadap perumahan dan permukiman menjadi sangat beragam. Ada yang memaknai perumahan dan permukiman sebagai suatu produk (fisik) dan sebagai proses (berhuni/bermukim) (Turner, 1972). Ada pula yang melihat dan memaknai berdasar sudut pandang lingkungan makro maupun mikro (Newmark dan Thompson, 1977). Perumahan dan permukiman dalam bahasan makro dikaitkan dengan pandangan perspektif manusia, perspektif budaya, dan perspektif perkotaan. Sedangkan dalam bahasan mikro, perumahan dan permukiman dikaitkan dengan proses pasar (*market*), tipe perumahan, investasi perumahan, proses perancangan-pembangunan-serta perawatan bangunan perumahan/hunian. Selain itu, perumahan dan permukiman dapat dipandang sebagai dua hal berdasarkan struktur (komponen lingkungan statis dan dinamis) dan mekanismenya (mekanisme internal dan eksternal).

Pada masyarakat modern, perumahan menjadi masalah yang cukup serius. Pemaknaan atas rumah, simbolisasi nilai-nilai dan sebagainya seringkali sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan status sosial. Rumah pada masyarakat modern, terutama di perkotaan, menjadi sangat bervariasi, dari tingkat paling minim, yang karena keterbatasan ekonomi hanya dijadikan sebagai tempat berteduh, sampai kepada menjadikan rumah sebagai lambang prestise karena kebutuhan menjaga citra kelas sosial tertentu. Masalah perumahan di Indonesia berakar dari pergeseran konsentrasi

penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia yang cukup tinggi, sekitar 4 % pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dan cenderung akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang tinggi tumbuhnya kota-kota di Indonesia. Sayangnya, terjadi keadaan yang tidak sesuai antara tingkat kemampuan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk lapangan kerja yang ada di perkotaan, mengakibatkan timbulnya kelas sosial yang tingkat ekonominya sangat rendah. Hal ini berakibat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kaum papa itu yang dapat dikatakan sangat minim. Rumah dan tempat hunian mereka tidak lebih merupakan tempat untuk tetap survive di tengah kehidupan kota. Kualitas permukiman mereka dianggap rendah dan tidak memenuhi standar hidup yang layak. (widyarningsih, 2006)

Maslow (dalam Marianata, 2014) menjelaskan hierarki kebutuhan manusia terhadap pemenuhan hunian yang terdiri dari: survival needs, safety and security needs, affiliation needs, esteem needs, cognitive and aesthetic needs. Teori ini menjelaskan terdapat tahapan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Setelah kebutuhan jasmani manusia terpenuhi, maka tempat berlindung atau rumah menjadi kebutuhan yang dipenuhi manusia sebagai motivasi pengembangan diri ke arah kehidupan yang lebih baik. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan, namun rumah telah memberikan ketenangan, kesenangan dan

kenangan atas segala peristiwa dalam kehidupan. Hal tersebut seide dengan adanya perbedaan antara rumah sebagai fisik bangunan dan rumah sebagai ruang hidup.

Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

UU tersebut merupakan perbaikan dari UU nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Berdasarkan visi dari Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) mengutarakan setiap orang (KK) Indonesia mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjatidiri, mandiri, dan produktif.

b. Permukiman

Doxiadis (Dalam Damayanti, 2016) Permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia yang tujuannya untuk mempertahankan hidup secara lebih mudah dan lebih aman, dan mengandung kesempatan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Pengertian permukiman juga dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik tata ruang, dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial.

Menurut Doxiadis (Dalam Damayanti, 2016) Permukiman atau perumahan akan berjalan dengan baik jika terkait dengan beberapa unsur, yaitu nature (alam), man (manusia), society (kehidupan sosial), shell (ruang), dan networks (hubungan).

Sedangkan menurut Charles (Dalam Hariyanto, 2015) Perumahan merupakan tempat tiap individu yang ada saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki sense of belonging atas lingkungan tempat tinggalnya. Perumahan juga dapat diartikan sebagai suatu cerminan dan pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu

bangsa. Pendapat ini di kemukakan menurut Yudhohusodo (1991) dalam bukunya yang berjudul Rumah Untuk Seluruh Rakyat.

Menurut Kuswanto dan Salim (Dalam Hariyanto, 2015) Dalam bukunya yang berjudul Perumahan dan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan menjelaskan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sumaatmadaja (1981) dalam Aji (2009) mengartikan permukiman sebagai bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi pula segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan penduduk yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.

Menurut Sastra dan Marlina (2006) dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dari segi penanganan dan pengelolaan, dijelaskan bahwa definisi perumahan dan permukiman berbeda. Biasanya sebuah perumahan hanya dikelola oleh suatu pengembang di bawah koordinasi pemerintah, sedangkan pengelolaan sebuah permukiman biasanya langsung ditangani oleh pemerintah dan konsep dan rencana pengembangannya sudah ditentukan dalam bentuk konsep pengembangan wilayah secara makro melalui Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

3. Rumah Tidak Layak Huni

Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus kepada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan. (Nugraha, 2014)

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Adapun kriteria rumah tidak layak huni apabila:

a. Kondisi rumah

1. Luas lantai perkapita kota < 4 m (persegi), desa < 10 m (persegi).
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas .
3. Tidak mempunyai akses mandi, cuci dan kakus.
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
7. Lantai dari tanah dan rumah lembab.

8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan

b. Kondisi lingkungan

1. Lingkungan kumuh dan becek.

2. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar

3. Jalan stapak tidak teratur. (<http://www.kemsos.go.id/moduls.diakses>

pada pukul 12 oktober 2017 pukul 19.15 WIB)

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsep merupakan sebuah penjelasan dari suatu hal yang telah dirumuskan dari sejumlah kejadian tertentu yang dapat diartikan untuk sebuah fenomena yang sama. Dalam hal ini definisi konsep digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar menghindari salah pengertian serta menjelaskan tujuan dari sebuah penelitian. Maka dalam penelitian ini disusun definisi konsep sebagai berikut:

a. Evaluasi program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH)

Evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi, yang kemudian informasi itu digunakan untuk alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan.

b. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia, sebagai tempat berlangsungnya kehidupan manusia untuk menempati tempat tinggal yang lebih layak.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan digunakan untuk mendeskripsikan yang akan diteliti. Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur evaluasi program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara:

A. Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Kabupaten Banjarnegara tahun 2016

1. Efektifitas
 - a. Hasil sesuai dengan tujuan
 - b. Program yang di jalankan sesuai dengan kebutuhan
 - c. Manfaat program bagi masyarakat
2. Efisiensi
 - a. Sumber dana.
 - b. Dampak yang dirasakan penerima bantuan.
3. Kecukupan
 - a. Pencapaian sasaran
 - b. Besaran dan
 - c. Strategi yang dijalankan
4. Pemerataan
 - a. Bantuan didistribusikan secara merata

5. Responsivitas
 - a. Program dapat memuaskan kelompok sasaran
 - b. Program mempunyai preferensi
6. Ketepatan
 - a. Efektifitas program benar-benar berguna dan dirasakan langsung kepada penerima bantuan
 - b. Program tepat sasaran

B. Indikator keberhasilan program Pemugaran Rumah Tidak Layak

Huni (RLTH) Kabupaten Banjarnegara tahun 2016

1. Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
2. Kenyamanan tempat tinggal, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin.
3. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melakukan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat.
5. Kondisi atap tidak ada yang bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk kedalam rumah.

I. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif yang diarahkan ke *case study*. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. (Raharjo, M, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *case study*. karena untuk mengangkat fakta, fenomena dan keadaan yang ada, sehingga penelitian ini bisa melihat situasi sosial lebih mendalam, dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait untuk mengetahui tentang evaluasi program pemugaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat pengumpul data yang sangat mendukung bagi peneliti. Berikut alat pengumpulan data yang digunakan :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mendapatkan keterangan informasi secara lisan dari sasaran penelitian atau dengan bercakap-cakap berhadapan muka langsung dengan orang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, artinya penulis membuat jadwal wawancara dan daftar pertanyaan wawancara sebagai pedoman akan tetapi pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tidak harus sama persis dengan pedoman sehingga tidak menutup kemungkinan ada variasi atau improvisasi pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informasi atau data yang ingin didapatkan oleh pewawancara. (Notoatmojo, 2012).

Tabel 1.4
Tekhnik Pengumpulan Data Wawancara

No	Narasumber	Jabatan	Jumlah
1	Ratih Pudji Astuti S.sos	Kepala Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Pedesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara	1
2	1. Darsono 2. Monah 3. Sutirah 4. Rihatin 5. Kidin	Masyarakat Desa Gunung Langit penerima bantuan RTLH	5
3	1. Kastani 2. Sutarno 3. Mono 4. Ribut 5. Ny. Kisem	Masyarakat Desa Karanggondang penerima bantuan RTLH	5
4	Cipto	Perangkat Desa Karanggondang	1
	Jumlah		12

b. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen sangat mendukung dalam perolehan data untuk melengkapi data primer demi kesempurnaan penelitian. Hal yang berkaitan dengan dokumen berupa laporan, catatan-catatan yang dimiliki pegawai yang berkaitan. Dokumen pendukung yang digunakan yakni;

1. Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Banjarnegara tahun 2016.
2. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Banjarnegara tahun 2016.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian mengenai evaluasi program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) lokasi yang digunakan untuk memperoleh data adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara yang menjadi fasilitator, regulator dan penanggung jawab. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara telah mengupayakan mengatasi kemiskinan yang terjadi di kabupaten Banjarnegara salah satunya dengan program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun namun kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara masih relatif tinggi.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pengambilan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Pedesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat desa Gunung Langit dan Karanggondang penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni tahun 2016. Sedangkan data sekunder adalah dokumen pendukung berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan kedua jenis data yaitu primer dan sekunder, karena kedua data tersebut dapat saling melengkapi. Penambahan data pada data primer dan sekunder dilakukan seiring dengan data yang didapatkan saat pelaksanaan penelitian berlangsung.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari pihak yang bersangkutan dengan objek yang diteliti tentang evaluasi program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara, sebagai fasilitator, regulator dan penanggungjawab.

Tabel 1.5
Data Primer Penelitian

Nama data	Sumber Data	Tehnik Pengumpulan Data
Efektifitas program Pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Banjarnegara tahun 2016	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara	Wawancara
Efisiensi program Pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara	Wawancara
Kecukupan program Pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara	Wawancara
Pemerataan program Pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara	Wawancara
Responsivitas program Pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara	Wawancara
Ketetapan program Pemugaran rumah tidak layak huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data yang tidak ditemukan dalam data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi program rumah tidak layak huni.

Tabel 1.6
Data Sekunder Penelitian

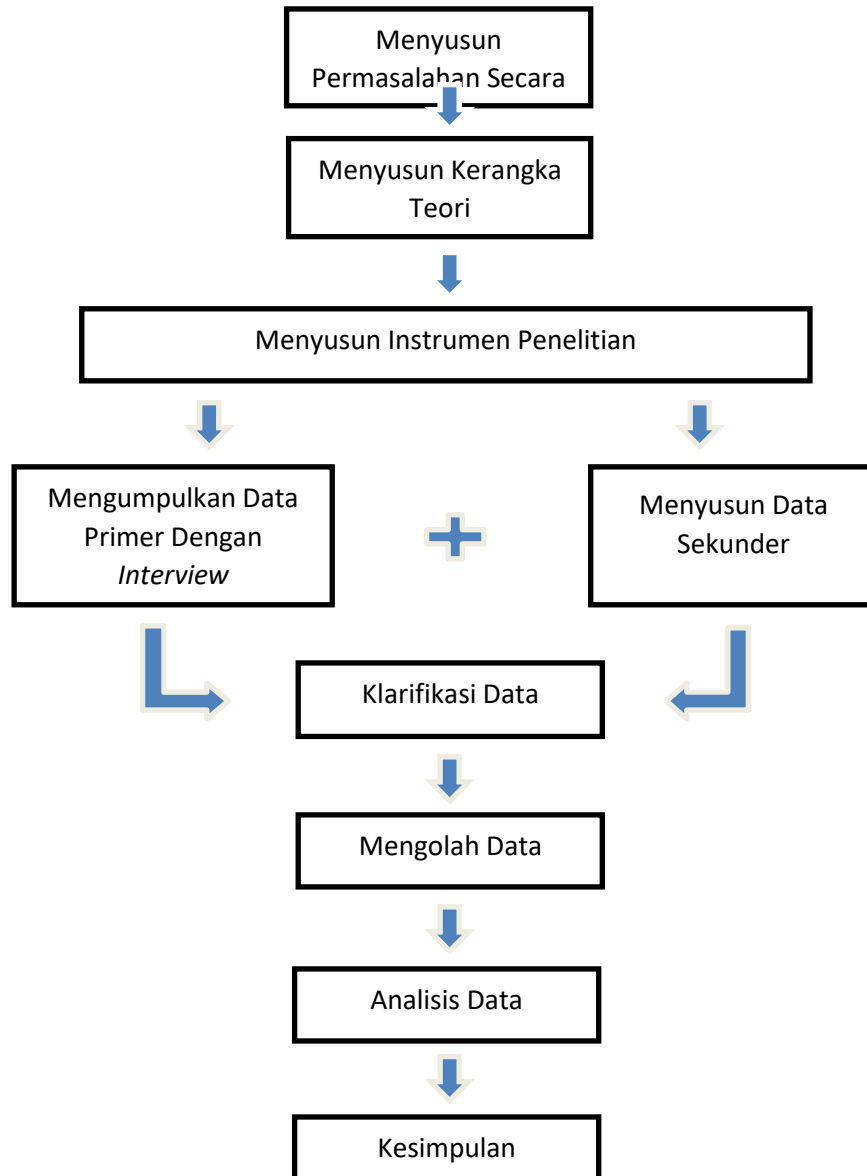
Nama Data	Sumber
Laporan monev program pemugaran rumah tidak layak huni kabupaten Banjarnegara tahun 2016	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara
Lakip program pemugaran rumah tidak layak huni kabupaten Banjarnegara tahun 2016	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa deskriptif adalah teknik analisa yang digunakan untuk menggambarkan data-data yang telah di dapatkan tanpa menggeneralisasi data tersebut. Teknik analisa data ini menjelaskan tentang bagaimana evaluasi Program Bantuan Tidak Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara. Data yang di peroleh dari hasil penelitian juga harus riil dan nyata.

Dengan menggunakan tehnik analisis data yang peroleh didalam penelitian lapangan tidak lagi dianalisis dengan menggunakan rumusan-rumusan atau angka-angka tetapi data diperoleh dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan peneliti.

Bagan 1.1
PROSES ANALISIS DATA



Dalam penelitian tentang Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016, penulis melakukan tahapan dengan melakukan tahapan penulis akan dipermudahkan dalam menyusun penelitian. Tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Menyusun permasalahan secara sistematis tentang evaluasi program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH), permasalahan yang ditemukan oleh penulis akan disusun dengan sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan. Pembahasan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain-lainnya.
2. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan tentang kerangka teori tentang evaluasi kebijakan dan rumah tidak layak huni (RTLH), dalam kerangka teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan pembahasan kerangka teori tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang judul penelitian.
3. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting untuk diperhatikan karena dalam penyusunan instrumen penelitian penulis dapat mengumpulkan jawaban pada data primer maupun data sekunder. Karena dalam data primer maupun data sekunder memberikan penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan yang ada dalam program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH). Pembahasan poin pada data primer maupun data sekunder memberikan arah penulis karena dapat dirangkai pada bab selanjutnya.
4. Klarifikasi data, memberikan panduan terhadap penulis untuk melakukan tahapan mengklarifikasi pada data temuan di lapangan. Karena dengan melakukan tahapan tersebut, dapat memberikan poin-poin jawaban yang

bermanfaat. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam melanjutkan penelitian.

5. Setelah klarifikasi data penulis akan mengolah data dengan baik. Karena tahapan ini sangat penting bagi penulis untuk dapat memberikan jawaban terhadap penelitian. Dalam melakukan tahapan pengolahan data, penulis mendapatkan hasil yang selanjutnya akan dilakukannya tahapan analisis data. Untuk analisis data penulis mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari awal sehingga penelitiannya dapat bermanfaat bagi pembaca.
6. Tahapan akhir, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian. Kesimpulan dapat memberikan penjelasan tentang penelitian serta penulis memberikan argumentasi pada penelitiannya terkait Evaluasi Program Reehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.